

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan informasi sangat erat dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi. Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan informasi semakin bertambah. Namun, informasi yang diperoleh setiap orang juga harus jelas dan akurat, maka perlu adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi erat kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Sebagai Negara demokrasi, Indonesia berusaha terus menjamin hak setiap orang sebagai pemohon informasi publik. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai UU ini dan/atau menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik juga mendorong terwujudnya pengelolaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan dokumen United Nations Development Program (UNDP) seperti dikutip oleh Pandiangan (2020: 4), terdapat 9 (sembilan) prinsip *good governance* yang meliputi *participation* (partisipasi masyarakat), *rule of law* (tegaknya supremasi hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (kepekaan), *concensus orientation* (beorientasi pada kasus), *equity* (kesetaraan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisien), *accountability* (akuntabilitas), dan *strategic vision* (visi strategis). Menurut Idrus (1999 dalam Hayat, 2017: 201) pembangunan *good governance* berdasarkan 3 (tiga) prinsip yaitu aspek akuntabilitas, transparan, dan partisipatif yang menggambarkan bahwa pemerintah hanyalah fasilitator dalam pencapaian tujuan tersebut sedangkan masyarakat dan dunia usaha harus dikedepankan karena globalisasi ditentukan oleh daya saing dan dunia usaha adalah pelaku utamanya. Oleh karena itu, untuk menciptakan *good governance* dibutuhkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kebijakan pemerintah.

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki predikat keterbukaan informasi publik yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil pemeringkatan layanan informasi publik tahun 2015-2020 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tampak pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Pemeringkatan Layanan Informasi Publik
Pemerintah Kota Semarang

NO	TAHUN	PENILAIAN	KETERANGAN
1	2015	-	Peringkat terbaik ke 2 setelah Pemerintah Kabupaten Batang
2	2016	-	Peringkat terbaik ke 3 setelah Pemerintah Kota Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Batang
3	2017	70,8	Cukup informatif ke 9
4	2018	81,3	Informatif ke 4
5	2019	89,11	Menuju Informatif ke 4
6	2020	98,3	Infomatif ke 1

Sumber: Laporan pemeringkatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam situs <https://kipjateng.jatengprov.go.id/laporan/laporan-pemeringkatan/> (diakses pada 28 Januari 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, Kota Semarang selalu memperoleh peringkat dalam layanan informasi publik dan nilai yang diperoleh terus meningkat.

Sebagai upaya dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan bentuk pengimplentasiaan UU No. 14 Tahun 2008, maka diperlukan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Kota Semarang juga membentuk PPID Kota Semarang yang berfokus pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kota Semarang dibantu oleh PPID pembantu yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja, Perusahaan Daerah dan Desa. Kota Semarang memiliki 32 Dinas Instansi, 6 BUMD, dan 16 Kecamatan sebagai PPID Pembantu.

Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan salah satu dari 32 dinas yang merupakan PPID pembantu di Kota Semarang dengan kategori informasi publik

yang cukup lengkap yaitu informasi berkala, setiap saat, serta merta dan dikecualikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Semarang mendapatkan peringkat ke 9 dari 16 Provinsi, Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia dalam penghargaan Kita Harus Belajar (Kihajar) tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud, 2019). Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2019 dalam peningkatan kemajuan di bidang pendidikan (PGRI, 2019). Capaian tersebut menunjukkan upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang terlihat dari ketersediaan situs resmi PPID yang disertai informasi publik yang cukup lengkap. Selain memiliki situs resmi PPID yang beralamat di ppid.disdik.semarangkota.go.id, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga memiliki 10 (sepuluh) situs yang mendukung pelayanan informasi publik dalam bidang pendidikan.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Data 10 Situs yang Dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO	ALAMAT SITUS	KETERANGAN
1	Simajar.semarangkota.go.id	Sistem pembelajaran untuk pengembangan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Dinas Pendidikan Kota Semarang
2	Dapodik.semarangkota.go.id	Lumbung data pendidikan yang berisi satuan pendidikan tiap kecamatan, satuan pendidikan (PAUD, SD, Sekolah menengah dan non formal), jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, serta jumlah peserta didik
3	Sangjuara.semarangkota.go.id	Situs pengadministrasian kejuaraan siswa yang terintegrasi dengan situs pendaftaran peserta didik (PPD) Kota Semarang
4	Apbs.semarangkota.go.id	Anggaran pendapatan dan belanja sekolah Kota Semarang
5	Simponi.disdik.semarangkota.go.id	Sistem informasi manajemen perizinan daring PAUD dan PNF
6	Sekolahberkarakter.semarangkota.go.id	Wadah informasi dengan tujuan mempublikasikan kegiatan penguatan pendidikan karakter siswa, guru dan masyarakat
7	Ppd.semarangkota.go.id	Situs layanan informasi penerimaan peserta didik Kota Semarang dari TK, SD, SMP Negeri
8	Smpn.semarangkota.go.id	Link daftar situs SMP Negeri di Kota Semarang
9	Gebersepti.semarangkota.go.id	Gerakan bersama sekolah Semarang peduli dan tanggap bullying yang berisi materi edukasi dan berita
10	Pakguru.semarangkota.go.id	Penilaian angka kredit guru

Sumber: Situs Dinas Pendidikan Kota Semarang dan PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang (observasi pada 3 Februari 2021)

Berdasarkan pengamatan peneliti, 10 (sepuluh) situs yang dikembangkan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mendukung layanan informasi publik sudah cukup baik. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan situs PPID pemerintah daerah lain, misalnya situs PPID Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danang Trijayanto dan Iqbal Aidar Idrus (2019: 107–116), Kota Yogyakarta sebagai kota pertama yang menerapkan atau

menyelenggarakan PPID. Pelayanan PPID Kota Yogyakarta dilakukan secara daring melalui situs resmi www.ppid.jogjakota.go.id dan secara luring. Namun pelayanan secara daring kurang digunakan oleh masyarakat karena kurangnya pihak pemerintah dalam pengelolaan situs yang ada sesuai kebutuhan masyarakat sehingga konten informasinya cenderung tertinggal. Maka dengan adanya pengembangan yang lebih baik dengan 10 (sepuluh) situs yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Semarang diharapkan dapat memberikan efek pada implementasi pelayanan informasi publik yang baik bagi masyarakat.

Dari 10 (sepuluh) situs yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, terdapat salah satu situs yang paling berkaitan dengan masyarakat yaitu situs penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang beralamat di ppd.semarangkota.go.id. PPDB merupakan wujud nyata dari layanan informasi publik di bidang pendidikan yang mudah, cepat, efisien, transparan, terukur dan akuntabel yang melibatkan sekolah, orang tua/wali, peserta didik, serta masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018, PPDB dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Dalam menghadapi situasi wabah Covid-19, maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dilakukan secara daring untuk jenjang TK, SD dan SMP Kota Semarang. Akan tetapi pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 ditemukan kekeliruan pada SK dimana TK B Ngaliyan tidak memiliki daya tampung sedangkan pada situs tertulis 20 kuota (Tagar.id, 2020). Hal seperti

itu dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat mengingat situs PPDB sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi yang terbuka.

Berdasarkan lampiran 2 (dua) Surat Edaran No. B/6001/800/V/2021 tentang PPDB, pendaftaran Tahun Ajaran 2021/2022 masih dilakukan secara daring dimulai 26-29 Juni 2021 untuk TK dan SD sedangkan pendaftaran daring SMP dilakukan 27-30 Juni 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pengembangan *e-government* di Kota Semarang dalam bidang pendidikan terutama dalam menghadapi situasi wabah Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui situs ppd.semarangkota.go.id pada Tahun Ajaran 2021/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dalam mengetahui kajian layanan informasi publik khususnya pada PPID

Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dapat menjadi salah satu referensi bagi pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik baik pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun pada situs ppd.semarangkota.go.id sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

b. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi penelitian karya ilmiah maupun skripsi ilmu komunikasi dalam kajian manajemen informasi publik.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan kemampuan dan pemahaman peneliti berkaitan dengan pengelolaan informasi publik yang akurat dan efisien dapat bertambah.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian laporan ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam latar belakang ini membahas permasalahan yang penting untuk diangkat dan diulas dengan mengaitkan pada kajian teoretis dalam bidang komunikasi yang menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang diulas dalam latar belakang dan berbentuk kalimat pertanyaan untuk menjawab penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian membahas kegunaan dari penelitian ini dibuat baik secara teoretis maupun praktis.

1.5 Tatakala Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan jadwal kegiatan dan lama waktu dalam menyusun penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang format dan sistematika penelitian laporan akhir yang berbentuk narasi yang menjelaskan setiap bab dan

subbab yang tersedia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga berisi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam pembuatan laporan akhir. Teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dapat diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan secara lebih rinci dan runtut rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari data penelitian yang akan dibandingkan dengan teori penelitian yang digunakan untuk melihat kesesuaian hasil penelitian tersebut. Data penelitian yang digunakan dapat disajikan dalam bentuk uraian dan data pendukung berupa gambar, foto, tabel dan lainnya sebagai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan hasil penelitian berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Saran merupakan hal yang dapat disampaikan dari hasil penarikan kesimpulan yang dibuat.